

PROSIDING

ISBN 978-602-5534-47-8



YOGYAKARTA
OKTOBER

2019

**SEMINAR NASIONAL
TAHUN KE-5**

CALL FOR PAPERS DAN PAMERAN
HASIL PENELITIAN DAN
PENGABDIAN
KEMENRISTEKDIKTI RI

EKONOMI & SOSIAL

PENGEMBANGAN RISTEK DAN PENGABDIAN
MENUJU HILIRISASI INDUSTRI



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2019

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL TAHUN KE-5, *CALL FOR PAPER* DAN PAMERAN
HASIL PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
KEMENRISTEKDIKTI RI

PENGEMBANGAN RISTEK DAN PENGABDIAN
MENUJU HILIRISASI INDUSTRI

Cetakan Tahun 2019

Katalog Dalam Terbitan (KDT):

Prosiding Seminar Nasional dan *Call For Paper*
Pengembangan Ristek dan Pengabdian menuju Hilirisasi Industri
LPPM UPNVY

1.468 hlm; 21 x 29.7 cm.
ISBN: 9 7 8 - 6 0 2 - 5 5 3 4 - 4 7 - 8

LPPM UPNVY PRESS

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
LPPM UPNVY Gd. Rektorat Lantai 4
Jl. Padjajaran 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telpon (0274) 486733, ext 154
Fax. (0274) 486400

www.lppm.upnyk.ac.id
Email: lppm@upnyk.ac.id

Penata Letak : Dedi Fatchurohman Hermawanto
Nanik Susanti
Desain Sampul : Sri Utami

Distributor Tunggal
LPPM UPNVY Gd Rektorat Lantai 4
Jln. Padjajar, Yogyakarta 55283
Telpon (0274) 486733, ext 154
Fax. (0274) 486400

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR REVIEWER
SEMINAR NASIONAL TAHUN KE-5, CALL FOR PAPER DAN PAMERAN
HASIL PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
KEMENRISTEKDIKTI RI
16 - 17 OKTOBER 2019
LPPM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

- | | |
|---|-------------|
| 1. Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc. | (UPNVY) |
| 2. Prof. Dr. Didit Welly Udjianto, M.S. | (UPNVY) |
| 3. Prof. Dr. Arief Subyantoro, M.S. | (UPNVY) |
| 4. Prof. Dr. Danisworo, M.Sc. | (UPNVY) |
| 5. Prof. Dr. Bambang Prastistho, M.Sc. | (UPNVY) |
| 6. Ptof. Dr. Suwardjono, M.Sc. | (UGM) |
| 7. Prof. Dr. Jogiyanto Hartono, M.Sc. | (UGM) |
| 8. Prof. Dr. Sucey Kuncoro, M.Si | (UNNES) |
| 9. Prof. Bambang Subroto, M.M. | (Brawijaya) |
| 10. Prof. Ahmad Sudiro | (Brawijaya) |
| 11. Prof. Idayanti, M.Si. | (UNHAS) |
| 12. Dr. Ardhito Bhinadi, M.Si. | (UPNVY) |
| 13. Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, M.T. | (UPNVY) |
| 14. Dr. Sri Suryaningsum, S.E., M.Si., Ak | (UPNVY) |
| 15. Dr. Mahreni, M.T. | (UPNVY) |
| 16. Dr. Hendro Widjanarko, S.E, M.M. | (UPNVY) |
| 17. Dr. Joko Susanto, M.Si. | (UPNVY) |
| 18. Dr. Rahmat Setiawan, M.Si. | (UNAIR) |
| 19. Dr. Rahmad Sudarsono, M.Si. | (UNPAD) |
| 20. Prayudi, S.I.P., M.A., Ph.D. | (UPNVY) |

Kajian Teoretis Tentang Manajemen Laba Dan Implikasinya Terhadap <i>Credit Rating</i> Indra Kusumawardhani , Windyastuti	919
Model Sosialisasi Dan Internalisasi Nilai-Nilai Bela Negara Di Kalangan Mahasiswa Upn "Veteran" Yogyakarta Untuk Mewujudkan "Kampus Bela Negara"	959
Isbandi Sutrisno, Sigit Tripambudi	
Budaya Komunikasi Masyarakat Sangiran Dalam Upaya Pelestarian Situs Arkeologi Sangiran Sebagai Warisan Budaya Dunia	972
Kurnia Arofah, Basuki Agus Suparno	
Keakuratan Model Prediksi Fraud Pada Industri Perbankan	980
Sri Astuti, Marita, Sucahyo Heriningsih	
Kebijakan Irregular Maritime Arrivals (Imas) Australia Dan Dampaknya Terhadap Indonesia Tahun 2010-2018	989
Muharjono, Hikmatul Akbar	
Kausalitas Antara Investasi Asing Dan Kemiskinan Di Indonesia	997
Purwiyanta, Ambar Puji Harjanto	
Upaya Reunifikasi Korea Dan Perkembangan Hubungan Antar Korea	1007
Reza Prima Yanti, Anik Yuniarti	
Transmisi Kebijakan Moneter Dengan Sasaran Akhir Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia	1015
Rini Dwi Astuti, Sri Rahayu Budi Hastuti	
Kontestasi Berita Hoax Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Media Daring Dan Media Sosial	1022
Rudi Wibowo, Edwi Arief Sosiawan, Ratnawati, M.Si	
Pengembangan Model Pengambilan Keputusan Multi Kriteria Pada Perusahaan Jasa untuk Menentukan <i>Trade-Off</i> Dari Tujuan Perusahaan Yang Saling Berkonflik Menggunakan Metode <i>Single Objective Approach</i>	1032
Sutrisno, Dyah Rachmawati Lucitasari	
Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Pulau Jawa Tahun 2001-2017	1039
Wahyu Dwi Artaningtyas, Asih Sriwinarti	
Strategi Pengembangan Desa Berbasis Potensi Lokal	1049
Eko Murdiyanto, Budiarto, Vandrias Dewantoro	
Migran Penduduk Dari Desa Sumbermulyo Beserta Hubungannya Dengan Daerah Asal	1056
Lukmono Hadi, Arif Wibawa	

DESENTRALISASI FISKAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI PULAU JAWA TAHUN 2001-2017

Wahyu Dwi Artaningtyas, Asih Sriwinarti
FEB UPN "Veteran" Yogyakarta
artaningtyas73@gmail.com, asihwinarti09@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to examine the effect of Fiscal Decentralization on Development Inequality in Java 2001-2017. The data analysis technique uses panel data regression with the Random Effect Model. The data used is a data panel consisting of time series data from 2001-2017 and cross sections covering DKI Jakarta, West Java, East Java, DIY, Central Java and Banten. The results of the study that Fiscal decentralization showed non significant impact on Development Inequality in all provinces of Java 2001-2017.

Keywords : Fiscal decentralization, Inequality

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2004). Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan wilayah (regional disparity) timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang, atau kurang maju. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Alisjahbana (2005) mengemukakan salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Indonesia adalah kesenjangan antar daerah sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Bali.

Indeks Williamson seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir dari tahun 2013-2017 masih terjadi ketimpangan wilayah pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa tersebut. Apabila nilai Indeks Williamson mendekati 1 maka provinsi di Pulau Jawa tersebut semakin timpang, sedangkan bila nilai Indeks Williamson menunjukkan wilayah tersebut semakin merata (Bonet, 2006). Tabel 1 menunjukkan dalam lima tahun terakhir tingkat ketimpangan tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata ketimpangan sebesar 0,64 sementara Propinsi Jawa Timur merupakan propinsi dengan rata-rata ketimpangan rendah yaitu sebesar 0,18. Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kategori propinsi dengan ketimpangan sedang.

Tabel 1. Indeks Ketimpangan Wilayah Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2017

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
DKI Jakarta	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Jawa Barat	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44
Jawa Tengah	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
DI. Yogyakarta	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Jawa Timur	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Banten	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27

Sumber : BPS, diolah

Banyak faktor yang menjadi sebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Salah satu faktor tersebut adalah adanya desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi peluang bagi suatu daerah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah melalui peningkatan potensi daerah secara efisien baik dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dimiliki. Desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat (Kuncoro, 2004). Namun demikian, menurut Bonet (2006) dalam penelitiannya yang menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional di Kolombia menyatakan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal setiap daerah meningkat, namun selama periode analisis ternyata disparitas pendapatan antara wilayah juga meningkat. Sementara menurut Kyriacou, Gallo dan Sagales (2015) bahwa desentralisasi fiskal dapat berkontribusi terhadap pengurangan disparitas antar daerah. Sedangkan Sacchi dan Salotti (2011) menyatakan sebaliknya, mereka menyatakan bahwa desentralisasi berkontribusi terhadap meningkatnya disparitas antar daerah. Qiao et.al. (2002) justru menyimpulkan dari hasil penelitian mereka bahwa variabel desentralisasi pengeluaran secara signifikan berkorelasi positif atau akan meningkatkan disparitas pendapatan regional. Sementara Akai dan Sakata (2005) tidak dapat menemukan dampak yang signifikan dari variabel desentralisasi pengeluaran terhadap disparitas pendapatan regional.

Tabel 2. Desentralisasi Fiskal Seluruh Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2017

Provinsi	Tahun					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
DKI Jakarta	67,95	71,36	76,20	68,58	67,72	70,36
Jawa Barat	64,25	67,40	66,78	61,54	71,10	66,21
Jawa Tengah	61,55	65,42	64,80	58,79	52,94	60,70
DI. Yogyakarta	47,08	46,65	46,86	42,93	36,42	43,99
Jawa Timur	66,50	69,53	69,29	63,37	58,03	65,34
Banten	66,11	69,31	67,86	63,11	59,31	65,14

Sumber: BPS, diolah

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa memiliki tingkat ketergantungan yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat ketergantungan yang paling rendah terhadap pemerintah pusat dibandingkan provinsi lain di

Pulau Jawa dengan derajat desentralisasi fiskal rata-rata sebesar 70,36 dari tahun 2013-2017. Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan kemampuan mengelola keuangan terendah dimana dari tahun 2013-2017 rata-rata derajat desentralisasi fiskal hanya sebesar 43,99.

Dari berbagai pendapat peneliti di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai pengaruh desentralisasi terhadap disparitas pendapatan regional. Pandangan pertama menyatakan bahwa desentralisasi akan mampu mengurangi disparitas tersebut. Namun pandangan lain menyatakan bahwa desentralisasi justru akan meningkatkan disparitas pendapatan antar wilayah. Disamping itu, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pusat rendah atau dengan kata lain daerahnya sudah mampu mengelola keuangannya sendiri, akan tetapi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat ketimpangan pembangunan paling tinggi di Pulau Jawa. Kondisi tersebut sangat menarik untuk dianalisis lebih jauh bagaimana sebenarnya kondisi derajat desentralisasi fiskal dan ketimpangan pembangunan antar propinsi di Pulau Jawa tahun 2001-2017 atau tepatnya pasca otonomi daerah serta bagaimana hubungan keduanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Ketimpangan Pembangunan

Menurut pasal 1 ayat 7 UU No.32 tahun 2004, "desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dari definisi tersebut, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama. Menurut Sjafrizal (2008) bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini jelas karena, dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi.

Penelitian Terdahulu

Christian Lessmann (2006) melakukan penelitian yang berjudul "Fiskal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries". Penelitian ini menggunakan metode estimasi OLS dengan menggunakan data panel data untuk periode tahun 1980-2001 di 17 OECD. Hasil yang di dapat dari penelitian ini bahwa di eropa barat desentralisasi berdampak positif terhadap disparitas pendapatan antar wilayah, tapi hasil ini ternyata tidak signifikan. Alasan berdampak positif; perbedaan latar belakang yang sulit dengan centralized, communist fiskal organization, dan pertumbuhan sangat cepat pusat aglomerasi.

Jaime Bonet (2006) melakukan penelitian yang berjudul "Fiskal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience". Penelitian ini menggunakan metode estimasi OLS dengan menggunakan data panel data untuk periode tahun 1990-2000 di Kolombia. Hasil yang di dapat dari penelitian ini bahwa pengalaman di kolombia pertumbuhan ekonomi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal meningkat di tiap

objek penelitian dan waktu.

Metode Fixed Effect pada metode estimasi ini mengasumsikan bahwa setiap objek memiliki intersep yang berbeda tetapi memiliki koefisien yang sama. Untuk membedakan antara objek yang satu dengan yang lainnya maka digunakan variabel dummy atau variabel semu sehingga metode ini juga disebut Least Square Dummy Variables (LSDV).

Model Random Effect pada metode ini tidak menggunakan variabel dummy seperti yang digunakan pada fixed effect. Metode ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarobjek. Model random effect mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep tetapi intersep tersebut bersifat random atau stokastik.

Dari 3 model yang akan diuji pada penelitian ini antara common effect, fixed effect, dan random effect maka dipilih model yang paling baik dimana model common effect dan fixed effect diuji dengan uji chow. Sedang untuk menguji model fixed effect dengan random effect maka dilakukan uji hausman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi Fiskal Seluruh Provinsi di Pulau Jawa

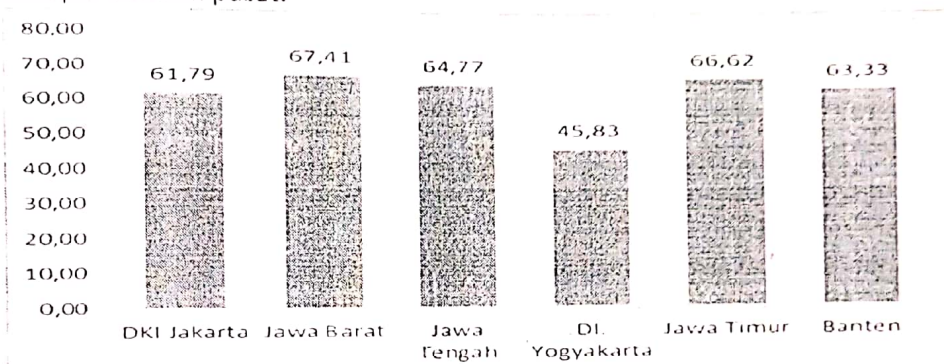
Desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya sendiri yang berarti juga bahwa pemerintah daerah semakin tinggi kemampuannya dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal yang menggambarkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dikur dengan melihat rasio jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah. Derajat desentralisasi fiskal provinsi-provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Desentralisasi Fiskal Seluruh Provinsi di Pulau Jawa
 Tahun 2001-2017

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI. Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2001	40,06	49,67	42,96	32,80	49,54	32,80
2002	42,06	56,27	48,15	36,38	50,84	42,45
2003	52,71	66,43	59,50	38,50	55,25	54,97
2004	55,69	70,39	64,69	53,81	72,35	60,79
2005	56,38	74,71	70,62	57,45	75,15	66,97
2006	54,52	74,27	68,89	49,54	72,57	70,43
2007	100,00	70,26	100,00	37,40	70,10	68,02
2008	54,39	72,51	71,08	50,28	73,67	70,65
2009	55,03	70,90	70,23	50,17	72,92	69,28
2010	62,47	73,44	71,13	52,57	73,80	74,74
2011	63,00	76,92	73,72	54,03	77,42	77,10
2012	62,30	59,15	56,69	46,23	62,23	62,73
2013	67,95	64,25	61,55	47,08	66,50	66,11
2014	71,36	67,40	65,42	46,65	69,53	69,31
2015	76,20	66,78	64,80	46,86	69,29	67,86
2016	68,58	61,54	58,79	42,93	63,37	63,11
2017	67,72	71,10	52,94	36,42	58,03	59,31

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa desentralisasi fiskal dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2001-2017 cukup variatif. Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dalam mengelola keuangan daerahnya ditunjukkan dengan nilai rata-rata desentralisasi fiskal sebesar 67,41 persen. Provinsi Jawa Timur mempunyai rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 66,62 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 64,77 persen, Provinsi Banten sebesar 63,33 persen, Provinsi DKI Jakarta 61,79 persen dan yang terendah Provinsi DI Yogyakarta dengan rata-rata sebesar 45,83 yang artinya masih ada ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat.



Sumber : BPS, data diolah

Gambar 1. Rata-Rata Desentralisasi Fiskal Provinsi Di Pulau Jawa

Analisis Data Panel

Pemilihan Model Estimasi

Uji Chow

Model ini digunakan untuk membandingkan model terbaik antara common effect model dan fixed effect model dengan cara membandingkan hasil probabilitasnya dengan nilai alfa (0.05). Adapun hipotesisnya yaitu : H0: Common Effect Model diterima dan Ha : Common Effect Model ditolak, Fixed Effect diterima. Uji ini dilakukan dengan melihat p-value signifikan (kurang dari 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi Fixed Effect Model, sebaliknya apabila p-value tidak signifikan (lebih besar dari 5%) maka model yang digunakan adalah estimasi Common Effect Model. Dari hasil regresi yang dilakukan untuk membandingkan model terbaik CommoEffect Model dengan Fixed Effect Model diperoleh hasil probabilitas sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	106.557012	(5,95)	0.0000
Cross-section Chi-square	192.608737	5	0.0000

Berdasarkan hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar $0,0000 < \alpha=0,05$, maka artinya menolak H0 atau menerima Ha sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis adalah Fixed Effect Model, lalu akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dengan uji Hausman untuk menguji Fixed Effect Model dengan Random Effect Model.

Uji Hausman

Teknik estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Hipotesis yang digunakan dalam uji hausman adalah sebagai berikut : H_0 : Random Effect Model diterima serta H_a : Random Effect Model ditolak, Fixed Effect diterima. Ketentuan uji hausman ini dengan melihat nilai probabilitas Cross-section random, apabila nilai probabilitas $> \alpha=0,05$, maka H_a ditolak artinya model yang terbaik adalah Random Effect. Begitu pula sebaliknya jika nilai probabilitas $< \alpha=0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya model yang terbaik ialah Fixed Effect. Berdasarkan nilai probabilitas Cross-section random diatas sebesar $0,0000 > \alpha=0,05$, maka ditolak yang artinya model yang terbaik ialah Random Effect.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.080314	1	0.7769

Sumber: olah data

Hasil Estimasi Random Effect Model

Berdasarkan teknik pemilihan model estimasi yang telah dilakukan, maka kesimpulannya ialah memilih model Random Effect. Berikut hasil estimasi Random Effect Model.

Tabel 7. Hasil Estimasi Random Effect Model Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.378889	0.071356	5.309876	0.0000
FISKAL?	0.000194	0.000542	0.358080	0.7210
Random Effects				
(Cross)				
_DKI--C	0.240575			
_JABAR--C	0.035410			
_JATENG--C	0.037903			
_DIY--C	-0.072751			
_JATIM--C	-0.098761			
_BANTEN--C	-0.142377			
Weighted Statistics				
R-squared	0.001292	Mean dependent var		0.034089
Adjusted R-squared	-0.008695	S.D. dependent var		0.055057
S.E. of regression	0.055296	Sum squared resid		0.305763
F-statistic	0.129411	Durbin-Watson stat		0.222449
Prob(F-statistic)	0.719802			

Sumber: olah data

Dari hasil uji random effect dapat ditulis rumus regresi sebagai berikut :

$$Y_{it} = 0,378889 + 0.000894 \text{ Fiskalit} + \text{eit}$$

Selama kurun waktu 17 tahun dari tahun 2001-2017, ternyata yang terjadi di seluruh

provinsi di Pulau Jawa adalah variabel desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar variasi dari desentralisasi fiskal mampu mempengaruhi variasi dari ketimpangan pembangunan wilayah. Berdasarkan perhitungan menggunakan regresi Random Effect Model nilai koefisien determinasi hanya menunjukkan angka 0,001292, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi ketimpangan pembangunan wilayah dapat dijelaskan oleh variasi dari desentralisasi fiskal hanya sebesar 0,1292 persen, sisanya sebesar 99,8708 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, jumlah tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, investasi dan lainnya.

Kondisi ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bonet (2006), Kyriacou, Gallo dan Sagales (2013), maupun Sacchi dan Salotti (2011) yang semuanya menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap disparitas antar daerah. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap disparitas antar daerah di seluruh provinsi di pulau Jawa mungkin salah satunya disebabkan karena sebagian besar dana dekonsentrasi tidak digunakan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pelayanan yang sasarannya adalah untuk mengurangi ketimpangan atau disparitas. Otonomi daerah bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun daerahnya. desentralisasi fiskal yang tinggi di suatu daerah menunjukkan bahwa pendapatan asli dari suatu daerah tersebut tinggi, dan artinya bahwa semakin tinggi belanja pemerintah yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan dari suatu daerah. Namun demikian belanja daerah yang digunakan pemerintah daerah antara belanja rutin dan belanja modal yang mana belanja modal digunakan untuk pembangunan ekonomi lebih tinggi yang dikeluarkan untuk belanja rutinnya sehingga tidak dapat mendorong pembangunan ekonomi dan tidak akan mengurangi tingkat ketimpangan. Peningkatan kemampuan PAD terhadap pendapatan suatu daerah harus diikuti kualitas belanja daerah yang baik agar dapat menyelesaikan ketimpangan di daerah dan berpengaruh secara signifikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dalam penelitian ini diambil kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan hasil olah data desentralisasi fiskal dari tahun 2001 hingga 2017 seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa, dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah berbeda-beda. Dari hasil perhitungan rata-rata desentralisasi fiskal, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dalam mengelola keuangan daerahnya ditunjukan dengan nilai desentralisasi fiskal sebesar 67,41 persen. Selanjutnya Provinsi Jawa Timur sebesar 66,62 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 64,77 persen, Provinsi Banten sebesar 63,33 persen, Provinsi DKI Jakarta 61,79 persen dan yang terendah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 45,83 yang artinya masih ada ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Sementara itu variabel Derajat Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Jawa tahun 2001-2017. Kedepannya pemerintah daerah harus lebih banyak mengambil kebijakan terkait upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan fiskalnya dengan lebih menggali potensi daerahnya serta mengoptimalkan bantuan pemerintah pusat pada kegiatan-kegiatan yang bersifat mendorong penurunan disparitas antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, & Sakata. 2005. Fiscal decentralization, commitment and regional inequality: Evidence from state level cross-Sectional data for The United States. Osaka: Osaka International University.
- Armida S. Alisjahbana. 2005. Kesenjangan Regional di Indonesia. Lembaga Penelitian SMERU. Diakses Tanggal 13 Januari 2019.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Indonesia Berbagai Tahun Terbitan. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2019. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia Berbagai Tahun Terbitan. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2019. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia Berbagai Tahun Terbitan. Jakarta
- Bonet. Jaime. 2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities : Evidence from The Colombian Experience. Original Paper. Ann Reg Sci 40:661-676
- Fadli, Faishal. 2014. Analysis of Direct and Indirect Effect of Fiscal Decentralization and Regional Disparity (Case Study Provinces in East and West Indonesia Year 2006-2012). Journal of Economics and Sustainable Development www.iiste.org ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol.5, No.18, 2014
- Fajrii, Muhammad, Arman Delis, Yohanes Vyn Amzar. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatra, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 9 No. 2, 99-107.
- Kurniawan, Ferry. 2016. Tesis Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di provinsi Sumatera Utara Tahun 1990-2013. Tesis Dipublikasikan. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Kyriacou, A., Muinelo-Gallo, L., Roca-Sagales, O. 2015. Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. Papers in Regional Science, Vol. 94, No. 1, pp. 89–107, doi: 10.1111/pirs.12061.
- Lessman, Christian. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries. Germany : Ifo Working Paper No. 25
- Qiao, et.al. 2003. The trade off between growth and equity in decentralization policy: China's Experience. United States of America: Andrew Young School of Policy Studies & Georgia State University.
- Sacchi, Salotti. 2011. Income inequality, regional disparities, and fiscal decentralization in industrialized countries. Faculty of Economics and Management, University of Barcelona.
- Sadono, Sukirno. 1985. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika. Jakarta
- Sjafrizal. 2008. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Padang: Praninta Offset.
- Suwanan, Ahmad Fawaiq dan Eka Heni Sulistiani. 2009. Fiscal decentralization and regional disparities in Indonesia: a dynamic panel data evidence. Journal of Indonesian Economy and Business Volume 24, Number 3, 2009, 328 – 336
- Todaro, Michael P., dan Stephan C. Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Widarjono, Agus. 2007. Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Ekonisia